

MASALAH KEMISKINAN DAN BEBERAPA PENDEKATAN PENANGGULANGANNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Moch. Lutfie Misbach

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga

ABSTRACT

Recently, poverty in Indonesia constitutes part of the complexity of nation's problem amid the fast transitional change and the globally uncertain condition of economy. In the state of high defence on foreign loan, currently, any efforts dealing with poverty problem need to be simultaneously supported by the development process of national awareness and self-supporting attitude.

To overcome the poverty, critical awareness in monitoring and responding the government operation which is based on good governance, from all aspects, needs to be developed. Therefore, synergetic plan and program implementation need to be continuously sustained in order that the development program can be effectively and efficiently carried out. One of the instruments expected to be able to encourage the implementation of comprehensively regional development plan is the coordinative forum of participative development.

Keywords: Demography, Labor Force, Unemployment, Poverty

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan sebenarnya sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusianya. Kemiskinan akan muncul karena sumber daya manusianya tidak atau kurang berkualitas, dan demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa pula diartikan sebagai upaya untuk menghapus ataupun mengentaskan kemiskinan. Usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut, tidak akan mungkin dapat dicapai bila penduduk masih dibelenggu oleh kemiskinan itu sendiri (*Ellis, 1984:242-245*). Secara ekonomi, kemiskinan dapat diartikan sebagai adanya kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam pengertian ini adalah mencakup konsep ekonomi yang luas dan tidak hanya pengertian finansial, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kemiskinan sekelompok orang sangat berkaitan dengan pendapatan dan kebutuhan. Oleh karena perkiraan kebutuhan hanya mengacu pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak, maka bila pendapatan seseorang atau keluarga tidak memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga itu dapat

dikategorikan miskin. Dalam hal ini, tingkat pendapatan atau kebutuhan minimum merupakan garis batas antara miskin dan tidak miskin. Garis pembatas antara miskin dan tidak miskin itulah yang disebut dengan garis kemiskinan. Cara demikian disebut dengan pengukuran kemiskinan absolut.

Tingkat pendapatan seseorang sangat mungkin sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimal (sudah di atas garis kemiskinan absolut), tetapi bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat (pendidikan, kesehatan dll) pada saat itu masih rendah atau masih di bawah kebutuhan fisik minimum, maka orang atau keluarga tersebut bisa dikatakan masih tergolong miskin. Kemiskinan dalam konsep ini ditentukan oleh perkembangan kebutuhan masyarakat dan karena kebutuhan masyarakat tidak hanya kebutuhan fisik (makan), tetapi ada kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dsb. Jadi yang dimaksud dengan kemiskinan dalam hal ini, adalah keadaan tidak tercapainya kebutuhan dasar manusia sesuai dengan kebutuhan saat itu. Keadaan atau kemiskinan semacam ini sering dikenal sebagai kemiskinan relatif. Berdasarkan kemiskinan relatif ini muncul pengertian kemiskinan sumber daya manusia. Kemiskinan sumber daya manusia, merujuk pada kurangnya pendidikan dalam arti luas, termasuk kurangnya tenaga terampil terlatih, kemampuan manajerial, kemampuan wiraswasta dan kepemimpinan. Ukuran yang dipakai dalam menentukan kemiskinan ini adalah distribusi kebutuhan nyata per kapita setiap sumber daya (pendidikan, kesehatan dan perumahan) tiap anggota masyarakat dibandingkan dengan kelompok lain.

2. KERANGKA TEORITIS

Disadari atau tidak bahwa masyarakat miskin itu tidak hanya ada di perkampungan kumuh di perkotaan, melainkan ada juga yang tinggal di pedesaan. Kaum miskin di pedesaan yang menghadapi berbagai masalah sosial ekonomi telah mendapatkan perhatian dari pemerintah antara lain dengan melalui bantuan IDT (Inpres Desa Tertinggal), yang dimulai sejak tahun 1995. Tidak terlalu menonjol memang gema masyarakat miskin di desa dengan IDT-nya, beda dengan masyarakat miskin di perkampungan kumuh di perkotaan. Hal ini adalah wajar mengingat kota adalah merupakan pusat dari berbagai kegiatan seperti pendidikan, industri, perdagangan dan pemerintahan, yang tentunya memerlukan penataan secara menyeluruh agar kegiatan berbagai sektor pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Tumanggor (1981) dalam Suparlan (1984), menyatakan bahwa : “Masyarakat miskin adalah kelompok (sejumlah orang) yang memperoleh pendapatan sebagai imbalan terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan, di mana jumlah penerimaan tersebut jauh lebih sedikit, bila dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah ini mempunyai beberapa ciri : pertama, pekerjaan yang menjadi mata pencaharian mereka umumnya merupakan pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar. kedua, nilai pendapatan mereka lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah jam kerja yang mereka gunakan. ketiga nilai pendapatan yang mereka terima umumnya habis untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari dan

keempat karena kemampuan dana yang sangat kurang, maka untuk rekreasi, pengobatan, biaya perumahan, penambahan jumlah pakaian, semuanya itu hampir tidak dapat dipenuhi sama sekali”.

Sebenarnya sampai saat ini belum ada batasan masyarakat miskin secara baku yang dapat dijadikan acuan yang digunakan untuk mengetahui dan merumuskan konsep-konsep dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun masyarakat miskin perkotaan utamanya yang tinggal di perkampungan kumuh. Menurut Azhari (1982) dalam Suparlan (1984), ada tiga macam kemiskinan, yaitu pertama, *Kemiskinan alamiah*, kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya, atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Termasuk di dalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah-tengah sumber daya alam yang tetap ; kedua, *Kemiskinan struktural*, kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural ini terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan kata lain kemiskinan ini tidak ada hubungannya dengan kelangkaan sumber daya alam; dan ketiga, *Kemiskinan kultural*, kemiskinan yang muncul karena tuntutan tradisi/adat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta-pesta adat lainnya. Termasuk juga sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi ke masa depan.

Sementara menurut Suparlan (1984), kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat. Standar kehidupan yang rendah ini, secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) ukuran kemiskinan adalah, dengan menetapkan batas kecukupan makan dan batas kecukupan non makan. Jadi dengan menggunakan data jumlah penduduk yang dirinci menurut pengeluaran per kapita sebulan, garis kemiskinan BPS ditetapkan, sehingga diperoleh jumlah dan persentase penduduk miskin. Penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran per kapita setara dengan kebutuhan makanan dan non makanan didefinisikan sebagai penduduk miskin. Batas kecukupan makanan dan non makanan penduduk di daerah perkotaan pada tahun 1995 ditetapkan sebesar Rp 29.000,- per kapita per bulan, sedangkan untuk daerah pedesaan ditetapkan sebesar Rp 21.500,- per kapita per bulan (BPS, 1997).

Sajogyo (dalam Reboing, dkk, 1984), menyatakan pula bahwa kemiskinan penduduk dapat pula diukur berdasarkan batas minimal jumlah kalori yang dikonsumsi per orang yang

persamaannya (setara) dengan beras yang dinyatakan bahwa kebutuhan per kapita di desa adalah 320 kg beras dan di perkotaan 420 kg beras per tahunnya.

3. POTRET KEMISKINAN DI JAWA TIMUR

Keadaan kemiskinan di Jawa Timur kondisinya hampir sama dengan keadaan di tiap-tiap kabupaten/kota, yaitu sejak tahun 1990 meningkat dan merupakan puncaknya pada tahun 1992, dan pada tahun 1999 meningkat kembali sebagai akibat dari pengaruh awal adanya krisis moneter yang berkepanjangan tersebut. Setelah itu, terus menurun dengan tenang hingga tahun 2004, kemudian kembali meningkat pada tahun 2005 dan setelah itu pada tahun 2006 menunjukkan adanya tanda-tanda menurun. Ada memang yang penurunannya melalui fluktuasi secara gradual, sehingga terkesan tidak terlalu mulus namun demikian akhirnya juga menurun.

Jawa Timur pada tahun 1990 jumlah penduduk miskin sebesar 9.858.618 jiwa atau sebesar 31,20 persen dari penduduk Jawa Timur secara keseluruhan. Kemudian meningkat sampai dengan tahun 1992 sehingga secara persentase menjadi sebesar 31,24 persen atau sama dengan sejumlah 10.059.208 jiwa. Kondisi ini kemudian menurun terus sampai dengan tahun 1998 sehingga menjadi 6.717.380 jiwa atau sebesar 20,08 persen dari total seluruh penduduk di Jawa Timur (lihat Tabel 1).

Kemudian meningkat kembali pada tahun 1999 menjadi 7.488.209 jiwa atau sama dengan 21,61 persen. Setelah itu menurun secara fluktuatif, dan akhirnya meningkat kembali pada tahun 2005 sehingga penduduk miskin di Jawa Timur bertambah menjadi 8.390.996 jiwa atau menjadi sebesar 22,51 persen. Keadaan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya kenaikan harga minyak mentah dunia sehingga mempengaruhi pula harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di dalam negeri, yang dampaknya demikian luas, sehingga pada saat itu ikut naik pula harga dari beberapa bahan pangan/sembako (sembilan bahan pokok). Pada saat yang sama pula, penghasilan masyarakat tidak mengalami kenaikan, akibatnya masyarakat tidak mempunyai daya beli dan bertambahlah jumlah penduduk miskin tersebut.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 1990 – 2006

Tahun	Jml. Penduduk	Jml. Penduduk Miskin	Pertumbuhan Penduduk Miskin (%)
1990	31.598.136	9.858.618	31,20
1991	31.938.571	9.864.898	30,89
1992	32.199.771	10.059.208	31,24
1993	32.285.454	9.708.236	30,07
1994	32.458.957	8.601.264	26,50
1995	32.655.151	7.582.853	23,22

1996	33.089.936	6.839.921	20,67
1997	33.257.624	6.768.259	20,35
1998	33.447.470	6.717.380	20,08
1999	34.654.521	7.488.209	21,61
2000	34.455.226	7.845.455	22,77
2001	35.055.924	7.267.843	20,73
2002	35.308.530	7.181.755	20,34
2003	36.190.005	7.578.422	19,52
2004	36.542.225	7.312.513	19,10
2005	37.276.748	8.390.996	22,51
2006	37.478.737	7.455.655	19,89

Sumber : BPS, Jawa Timur dalam Angka

Pada tahun 1990, kelompok distribusi masyarakat yang berpenghasilan 40 % terendah, menerima pendapatan sebesar 23,3 persen dari total pendapatan Jawa Timur, dan pada tahun 2005 dari kelompok yang sama tersebut menerima 19,8 persen. Sedangkan penduduk dari kelompok distribusi masyarakat yang berpenghasilan 20 % tertinggi pada tahun 1990 terlihat menerima 40,1 persen dan pada tahun 2005 menjadi sebesar 45,5 persen dari total pendapatan Jawa Timur. Perkembangan pola distribusi pendapatan di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 2.

Keadaan ini jika diukur berdasarkan kriteria Bank Dunia, perkembangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Timur menunjukkan adanya *ketimpangan pendapatan yang rendah* dalam kurun waktu tersebut, karena jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk / masyarakat berpendapatan terendah masih mencapai lebih dari 17 persen dari total pendapatan daerah tersebut (Jawa Timur).

Tabel 2.
Perkembangan Distribusi Pendapatan Masyarakat di Jawa Timur
Tahun 1990 – 2006

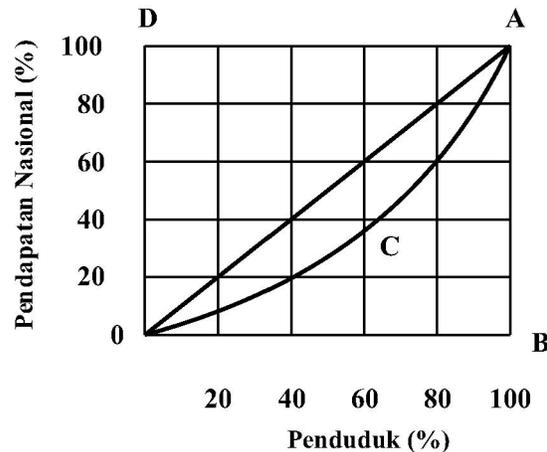
Tahun	40 % Terendah	40 % Sedang	20 % Tertinggi	Gini Rasio
1990	23,3	37,6	40,1	0,303
1996	21,6	37,4	41,0	0,298
1999	23,0	37,0	40,1	0,270
2000	24,7	38,1	37,1	0,259
2002	22,3	37,0	40,7	0,297
2005	19,8	34,7	45,5	0,287

Sumber : BPS, Jawa Timur dalam Angka

Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia, kelompok pendapatan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi (Fitria, 2007: 8). Berdasarkan kategori tersebut Bank Dunia membagi ketidakmerataan menjadi beberapa tingkat, yaitu :

pertama, ketidakmerataan pendapatan tinggi. Kategori yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima oleh 20 persen penduduk yang berpendapatan tinggi kurang dari 12 persen dari seluruh jumlah pendapatan nasional/daerah ($< 12\%$); kedua, ketidakmerataan pendapatan sedang.

Kategori yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima 40 persen penduduk yang berpendapatan sedang terletak antara 12 – 17 persen dari jumlah pendapatan nasional / daerah (12-17 %); ketiga, ketidakmerataan pendapatan rendah. Kategori yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah mencapai lebih dari 17 persen dari seluruh jumlah pendapatan nasional/daerah ($> 17\%$).



Sumber : Rosyidi, 2005

Gambar 1.
Kurva Lorenz

Menurut Kuznets, terkonsentrasinya pembangunan pada tahap awal pada masyarakat pra industri, di mana masih menonjolkan sektor pertanian, maka masuknya industri kapitalis dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan yang diterima (Kuznets, 1966).

Untuk lebih jelasnya maka distribusi pendapatan nasional dapat dilukiskan melalui Kurva Lorenz seperti dapat dilihat pada Gambar 1.

Kurva Lorenz semakin mendekati diagonal, maka pendapatan nasional semakin merata, jika semakin melengkung maka pendapatan nasional tidak merata. Terdapat tiga keadaan pemerataan pendapatan nasional, yaitu : pertama, *Absolute Equality*, keadaan pemerataan pendapatan nasional yang sangat merata, setiap penduduk menerima bagian yang sama dari pendapatan nasional yang menjadikan seluruh penduduk kaya atau miskin semua, hal ini ditunjukkan oleh garis OA; kedua, *Absolute Inequality*, keadaan yang sangat tidak merata, sebagian penduduk menerima seluruh pendapatan nasional, dan

sebagian tidak menerima sama sekali, sehingga terjadi ketidakmerataan pendapatan karena yang kaya bertambah kaya, dan yang miskin bertambah miskin. Hal ini ditunjukkan pada garis OBA. ; ketiga, *Actual Inequality Income Distribution*, keadaan pemerataan pendapatan nasional aktual, yaitu keadaan yang sesuai dengan kenyataannya, keadaan di mana pendapatan nasional yang diterima oleh sebagian besar kelompok masyarakat adalah tidak merata. Pemerataan pendapatan aktual ini ditunjukkan pada garis OCA (Rosyidi, 2005 : 128).

Indeks GINI	
$\leq 0,3$	Ketimpangan RINGAN
$> 0,3 - < 0,5$	Ketimpangan SEDANG
$\geq 0,5$	Ketimpangan BERAT

Sumber : Rosyidi, 2001

Selain itu, pada negara-negara berkembang, indeks Gini menunjukkan angka yang tinggi. Selanjutnya, ada kemungkinan besar Koefisien Gini akan menurun seiring dengan perkembangan perekonomian sebagai akibat adanya pembangunan. Perekonomian menjadi semakin baik dan pemerataan pendapatan menjadi semakin merata, dan rasio Gini akan menunjukkan angka yang menurun, sedangkan gini rasio juga menunjukkan hal yang serupa yaitu menunjukkan angka 0,30 pada tahun 1990 dan menjadi 0,29 pada tahun 2005. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Timur masih tergolong rendah ringan.

Keadaan tersebut juga menunjukkan bahwa usaha-usaha penanganan masalah pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, mulai menunjukkan hasil selain juga usaha dari mereka sendiri para kaum miskin yang berkeinginan kuat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan tersebut. Bukti empiris mengungkapkan bahwa kaum miskin di kota bekerja keras, mempunyai aspirasi tentang kehidupan yang baik dan motivasi untuk memperbaiki nasib. Hasil penelitian Bromley dan Gerry (1979:63) serta Papanek dan Koentjorojakti (1986:57-79) menemukan bahwa kaum miskin sebagian besar mampu menciptakan lapangan kerja sendiri serta bekerja keras untuk memenuhi tuntutan kehidupan mereka. Studi Sethuraman (1981: 198) dan Steele (1986) menemukan bahwa sebagian besar penduduk miskin dari tahun ke tahun berusaha memperbaiki nasib dengan cara beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Dalam pandangan Lloyd (dalam Breman, 1985: 174) ini adalah kiat penduduk miskin untuk mencari jalan keluar dari kemelut kemiskinan. Dalam bidang ekonomi bahkan kaum miskin di kota mempunyai andil dalam menopang kehidupan kota (Suparlan, 1984; Rebong dkk 1984). Melalui kegiatan usaha kecil-kecilan dan mandiri di bidang ekonomi informal mereka memberikan peluang bagi masyarakat elit kota untuk menikmati pelayanan dan jasa murah yang mereka sediakan.

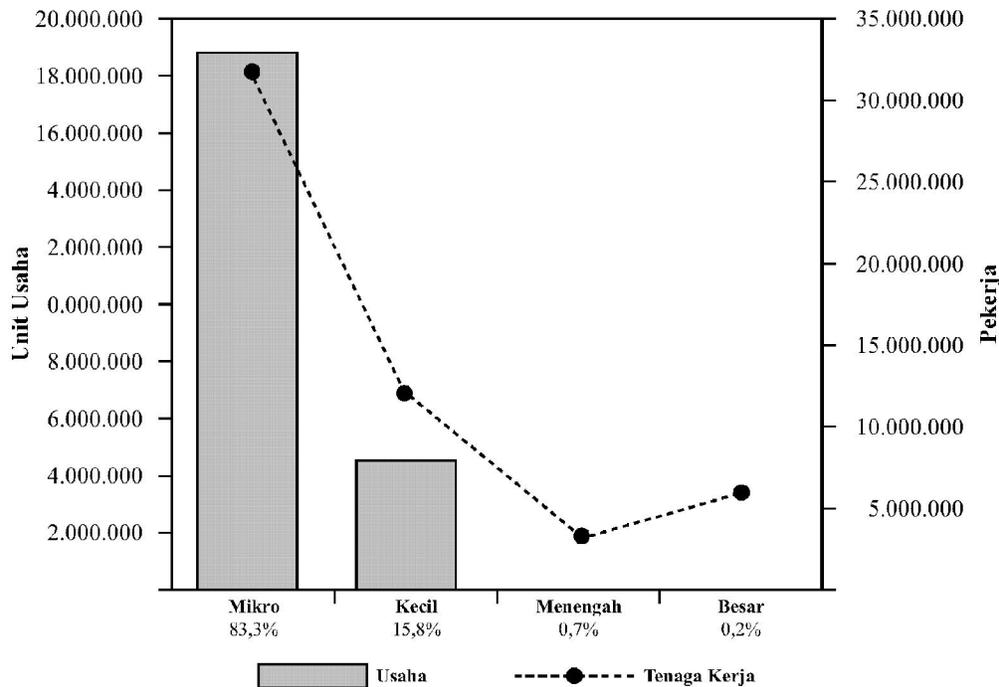
Program Penanggulangan Kemiskinan

Upaya menanggulangi kemiskinan, telah lama menjadi perhatian dalam proses pembangunan. Sejak PJP I (Pembangunan Jangka Panjang I), strategi dipusatkan pada peningkatan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan beberapa kebijakan makro. Beberapa kebijakan yang secara tidak langsung berupaya memerangi kemiskinan di antaranya adalah : pertama, merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pedesaan, dengan dana bantuan INPRES dan BANPRES. Kedua, penyebaran sarana sosial, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, keluarga berencana, perbaikan lingkungan (perumahan) dan lain-lain. Ketiga, memperluas jangkauan sarana keuangan dengan mendirikan beberapa institusi kredit, seperti KUPEDES, KURK, BKK, KCK (Candak Kulak), BIMAS, KUT dan sebagainya. Keempat, peningkatan sarana produksi pertanian, khususnya infrastruktur (irigasi). Kelima, pengembangan beberapa program pengembangan wilayah, seperti PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), P4K (Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil). Meskipun ada beberapa kekurangan, upaya itu telah menunjukkan hasil dalam mengurangi kemiskinan. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan telah menurun dari sekitar 60 % pada awal PJP I menjadi sekitar 15 % di awal PJP II.

Semua ini adalah apa yang sudah dilakukan dalam masa lampau, untuk saat ini ada juga usaha-usaha ke arah pengentasan kemiskinan, terutama dalam rangka menanggulangi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara besar-besaran sebagai akibat dari adanya krisis finansial global di Amerika, di antaranya adalah :

1. Mendorong sektor riil

Kemiskinan dan pengangguran sebenarnya berjalan seiring, artinya makin tinggi atau makin besar jumlah pengangguran maka ada kecenderungan makin tinggi atau makin besar pula jumlah penduduk miskin. Untuk itu, dilakukan pendekatan untuk pengentasan pengangguran terlebih dahulu dengan harapan kemiskinan juga akan dapat dientas.



Gambar 2
Distribusi Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja
Menurut Skala Usaha di Indonesia
Tahun 2006

Sumber : Data Sensus Ekonomi 2006 Indonesia diolah dan disusun kembali

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa sektor Usaha Mikro justru menunjukkan perkembangan yang sangat pesat terutama dalam penyerapan tenaganya, yang kemudian diikuti oleh sektor Usaha Industri Kecil, dibandingkan dengan sektor lainnya untuk periode yang sama. Dengan demikian usaha pemerintah melalui dunia perbankan dengan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri mulai menampakkan hasilnya. Demikian juga Perbankan Syariah dengan kredit tanpa agunannya. Untuk itu, usaha ini perlu dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan.

2. Program BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Bantuan ini maksudnya baik yaitu untuk menaikkan daya beli kaum miskin, tetapi kenyataannya di lapangan belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil. Pada umumnya, kalau yang menerima bantuan itu para bapak, maka sebagian besar dari dana bantuan itu akan digunakan untuk membeli rokok. Sedang kalau kaum ibu yang menerima dana bantuan, maka sebagian besar dari dana bantuan tersebut, akan digunakan untuk membeli pulsa dan digunakan untuk ngrumpi. Keranjang telpon genggam (*hand phone*) tidak

hanya di perkotaan saja, tetapi sudah merambah juga sampai ke pedesaan. Bantuan ini sangat tidak mendidik, bahkan cenderung menjadi malas dan hanya mengharap. Bantuan lainnya

Bantuan lain berupa RASKIN (Beras untuk Keluarga Miskin), penjualan beras murah atau penjualan sembako murah, ELPIJInisasi untuk mengganti minyak tanah dan masih banyak lagi. Sedang untuk bidang kesehatan ada yang disebut JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat), ASKESKIN (Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin) serta berobat ke PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dengan menunjukkan kartu GAKIN (Keluarga Miskin) dan sebagainya. Sedang untuk bidang pendidikan munculnya sekolah gratis dengan adanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Bantuan-bantuan ini belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, artinya pelaksanaannya masih terkesan amburadul sehingga kaum miskin juga yang merasakan dampaknya.

3. Menyukai Produksi Dalam Negeri

Yang satu ini lebih bersifat ajakan, himbauan ataupun merupakan sebuah gerakan untuk lebih mencintai produksi dalam negeri. Memang belum santer didengungkan, namun sangat perlu digalakkan, yaitu perlu membiasakan mengkonsumsi dan sekaligus lebih menyukai makanan yang dihasilkan oleh hasil produksi dalam negeri. seperti jagung, padi (beras), ketan dan lainnya, katimbang mengkonsumsi makanan yang bergaya luar seperti : spaghetti, pizza hurt, ayam goreng (Mc Donald maupun KFC). Kebiasaan mengkonsumsi dan sekaligus lebih menyukai makanan hasil produk dalam negeri ini, akan lebih mendorong kaum miskin di sektor pertanian untuk memacu dirinya untuk mengentas dari tekanan kemiskinan yang membelenggunya selama ini, dengan cara harus bekerja lebih giat karena adanya permintaan yang meningkat akan hasil-hasil pertanian.

4. Revitalisasi Pasar Tradisional

Pasar tradisional keadaannya saat ini sepi dan cenderung tutup, bahkan ada yang sudah tutup. Hingga ada yang mengatakan, pasar tradisional itu seolah-olah mati tidak dan hidup pun tak mau. Mengapa demikian, karena mereka para penjual di pasar tradisional tidak mampu bersaing dengan munculnya dan semakin menjamurnya pasar ataupun toko-toko swalayan yang ada hampir di semua kota. Tempatnya yang bersih dengan ruangan ber AC, sehingga pengunjung menjadi sangat betah dan berlama-lama untuk berbelanja di pasar ataupun toko swalayan, keadaan ini sangat bertolak belakang dengan keadaan di pasar tradisional yang pada umumnya jorok, kumuh dan berbau, karena penataannya yang tidak profesional (kurang memenuhi syarat).

Seharusnya ada aturan yang mengatur agar pasar tradisional tidak perlu bersaing dengan swalayan-swalayan tersebut. Misalnya barang-barang yang dijual di pasar tradisional dan di swalayan tidak boleh sama. Dengan demikian, maka mereka akan berjalan seiring dan tidak perlu untuk bersaing. Pasar tradisional jumlahnya sangat banyak, dan kalau

pasar ini dapat tumbuh kembali dan bergairah, maka ada kemungkinan akan mampu mendorong dan membangkitkan kembali kaum miskin di sektor pertanian yang selama ini agak lesu mengingat permintaan akan hasil pertanian sangat kurang.

Mudah-mudahan keadaan ini akan mampu mengentas para pengangguran yang ada di pedesaan dan pada akhirnya juga berimbas pula dalam mengentas para kaum miskin. Kaum miskin, cenderung dan lebih suka berbelanja pada pasar tradisional sesuai dengan kemampuan daya beli mereka, karena di pasar tradisional tersebut mereka dapat menawar, boleh ngutang ataupun bahkan diperbolehkan membeli suatu barang dengan memperoleh bonus barang yang lain.

5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

Ada yang lebih penting dari yang telah disebutkan terdahulu dan belum pernah dilakukan, yaitu masalah sarana dan prasarana transportasi arus barang dari produsen agar dapat sampai pada konsumen dengan lebih cepat dan aman. Sedang sebagian besar jalan yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah merupakan peninggalan jaman Belanda yang tampaknya sudah mulai rusak, akibat dari seringnya banjir dan juga tanah longsor di beberapa daerah, selain itu juga karena umur jalan tersebut secara ekonomis maupun teknis sebenarnya sudah habis, hanya karena selalu diperbaiki walaupun seringkali hanya dengan cara tambal sulam sehingga jalan-jalan tersebut masih tampak baik. Ditambah lagi dengan adanya kejadian lumpur Lapindo di Porong, sehingga arus hasil produksi pertanian seperti sayur mayur dan buah-buahan akan busuk di jalan karena jalanan macet dan juga banyak yang rusak.

Sarana jalan antar Desa, kemudian dari Desa ke Kecamatan dan juga antar Kecamatan, terus ke kota Kabupaten/Kota sampai ke ibu kota Provinsi dan selanjutnya ke Dermaga dan juga ke Bandara (ekspor), bahkan untuk dunia perbankan bagaimana, semua ini merupakan arus perekonomian yang penting. Bahkan seringkali dikatakan sarana jalan itu, merupakan urat nadi perekonomian. Untuk itu, jalan harus baik agar perekonomian menjadi lebih baik. Penanganan maupun perbaikan proyek sarana dan prasarana arus perekonomian ini, bisa dilakukan dengan cara *labor intensive* agar mampu mengentas pengangguran yang kemudian diharapkan juga akan mampu mengentas kemiskinan.

Mengapa dipilih *labor intensive* atau padat karya, karena dengan cara itu maka proyek perbaikan itu dikerjakan beramai-ramai dengan seluruh warga. Dengan demikian warga merasa ikut mengerjakan perbaikan sarana dan prasarana tersebut, sehingga kaum pengangguran maupun kaum miskin akan merasa ikut memiliki sehingga merekapun akan ikut menjaga hasil karya mereka, selain itu, untuk mengentas mereka dari pengangguran dan kemiskinan.

6. Perbaikan Irigasi dan Pupuk

Sarana jalan ataupun arus transportasi *marketing* sudah menjadi baik, maka bagaimana dengan hasil-hasil pertanian yang akan dipasarkan? Enam puluh persen stok pangan

nasional adalah dihasilkan oleh Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, sarana irigasi yang juga merupakan peninggalan Belanda, juga harus mendapat perhatian untuk diperbaiki. Selain itu, air yang berasal dari sungai-sungai yang merupakan sumber air untuk disalurkan pada jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian, tampaknya juga sudah ada pendangkalan di sana-sini sehingga kalau turun hujan, air sungai tersebut meluap sehingga menggenangi areal pertanian yang akhirnya merusak hasil panen.

Tidak ada cara lain, selain harus mengeruk sungai-sungai tersebut ? Air sungai seharusnya dialirkan ke lahan-lahan pertanian agar bermanfaat untuk pertanian, bukan sebaliknya justru air sungai itu merusak lahan pertanian. Penyebab lain, tentunya juga akibat dari adanya penggundulan hutan. Untuk itu, penghutan kembali pada lahan-lahan hutan yang gundul juga sangat perlu untuk diperhatikan.

Ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya dari yang telah diuraikan terdahulu, dan merupakan kebutuhan pokok bagi para petani, yaitu pupuk. Pada saat petani membutuhkan pupuk untuk tanamannya, seringkali pupuk tersebut menghilang dari peredaran. Saluran distribusi pupuk ini, tampaknya juga perlu mendapatkan perhatian, agar para petani tidak lagi kecewa akan keberadaan pupuk, sehingga petani tidak lagi harus bekerja sia-sia. Dengan demikian, saat petani membutuhkan pupuk untuk lahan pertaniannya, pupuk tersebut sudah ada dan tersedia di distributor. Sudah saatnya diperhatikan kaum miskin dan juga kaum pengangguran di sektor pertanian.

7. Penanganan Dampak Lumpur Lapindo

Para korban lumpur Lapindo, sudah lebih dari 2 (dua) tahun bahkan menjelang ulang tahunnya yang ke 3 (tiga) pada bulan Mei mendatang (Mei 2009), namun belum juga ada tanda-tanda bahwa penderitaan mereka akan berakhir. Mereka semua, semula juga merupakan keluarga petani, mata pencaharian sehari-hari mereka pada umumnya adalah petani. Lumpur telah menggenangi lahan-lahan pertanian dan bahkan juga rumah-rumah mereka, sehingga mereka harus mengungsi sambil menunggu penyelesaian dari pemerintah maupun pihak swasta (PT. Minarak Lapindo Jaya) yang tidak kunjung datang. Mereka telah menjadi kaum miskin baru, yang tidak dapat berbuat apa-apa selain menunggu dan menunggu. Berharap, itulah yang ada dalam benak mereka dan tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Sampai saat ini, mereka hanya bisa menunggu adanya bantuan serta belas kasihan penduduk sekitar dan juga bantuan dari para dermawan.

Jelas tidak dapat dibiarkan begitu saja kasus ini, pemerintah harus tegas dan potensi mereka di sektor pertanian harus segera diberdayakan kembali. Selain itu, kalau perlu membangun jalan tol baru di samping jalan yang tergenang lumpur Lapindo, dan bagi korbannya segera diberikan lahan-lahan pertanian dan juga rumah-rumah pengganti agar mereka bisa kembali menggarap lahan pertaniannya seperti semula.

8. Pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima)

Sektor informal atau sering disebut PKL (Pedagang Kaki Lima), merupakan usaha kaum miskin agar mereka tetap bisa hidup (*survive*). Sektor ini juga merupakan saluran yang paling murah, mudah dan juga merupakan sektor yang mampu menampung pekerja secara besar-besaran serta bersifat massal. Mereka memilih sektor informal, karena kesempatan kerja di sektor formal dirasakan semakin sulit untuk dapat menampung kaum pengangguran yang pada umumnya tidak mempunyai keterampilan (*un-skilled workers*) atau paling-paling hanya setengah terampil (*semi-skilled workers*).

Umumnya, para PKL tersebut patut diacungi jempol, karena mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa mengharap bantuan dari pihak manapun termasuk pemerintah. Sayangnya, mereka para PKL ini kadang dengan seenaknya saja menawarkan barang-barang dagangannya tanpa memperhatikan segi keindahan tata kota. Keadaan inilah yang seringkali berbenturan dengan aturan-aturan yang ada di perkotaan, sehingga mereka harus digusur dan juga dikejar-kejar oleh aparat pemerintah (Satpol PP). Mereka berpikiran sangat sederhana sebenarnya, sesuai dengan tingkat pendidikan mereka yang pada umumnya rendah, yaitu dengan berdagang di daerah pemukiman atau lokasi dimana banyak lalu lalang penduduknya adalah merupakan pasar yang baik bagi para PKL.

Untuk itu, alangkah baiknya kalau mereka para PKL tidak lagi di kejar-kejar dan juga digusur, tetapi mereka diberikan tempat atau dilokalisir di suatu tempat yang permanen. Tentunya, dengan cara duduk satu meja dan berembug dengan mereka para PKL. mengenai penataan kembali lokasi mereka. Misalnya, satu lokasi khusus untuk para PKL buah-buahan, kemudian pada lokasi lain khusus untuk PKL makanan dan minuman, dan lokasi lainnya lagi untuk PKL bunga dan tanaman untuk kebun, dan sebagainya. Dengan demikian, nantinya mereka dapat dikenakan retribusi, sehingga dapat memberikan sedikit tambahan bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah), selain itu juga tidak lagi memberikan kesan semrawut dari sisi tata kota.

9. Penyelenggaraan Festival Pertanian

Festival Pertanian, hanyalah merupakan sarana untuk lebih menggairahkan kaum miskin di sektor pertanian dalam mengerjakan lahan pertaniannya, karena permintaan akan hasil-hasil pertanian sudah menjadi semakin banyak. Festival dapat dilakukan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota yang disebut Festival Pertanian Kabupaten/Kota, kemudian para pemenang Festival Pertanian pada masing-masing Kabupaten/Kota dimunculkan pada festival antar Kabupaten/Kota yang disebut Festival Pertanian Provinsi. Pelaksanaan Festival, terserah pada panitia, misalnya dilaksanakan pada saat setelah musim panen dan dengan penekanan pada tanaman-tanaman tertentu. Misalnya, Festival Pertanian Kabupaten/Kota tahun depan (2010) penekanannya pada tanaman buah-buahan dan sayur-mayur.

Pada tahun-tahun awal pelaksanaan Festival Pertanian, mungkin belum muncul adanya keajaiban-keajaiban. Tapi tidak mustahil nantinya akan muncul hal-hal yang luar biasa, misalnya untuk buah-buahan : buah durian yang semula bijinya cukup besar dengan dagingnya yang tipis, kemudian muncul durian “montong” dengan daging yang tebal dan biji yang kecil, maka suatu saat biji yang kecil tadi ada kemungkinan akan hilang alias muncul temuan baru yaitu durian tanpa biji.

Demikian pula dengan sayur-mayur, ada kemungkinan nantinya ditemukan teknik cara menanam maupun teknik pemupukan yang benar sehingga dapat menghasilkan kentang sebesar buah melon. Jadi dengan adanya Festival Pertanian, maka para petani akan lebih bergairah dalam menggarap lahan pertaniannya, karena pada acara Festival Pertanian tersebut, merupakan pertemuan paling akbar dan merupakan tempat belajar yang paling baik terutama dengan para petani yang sukses tersebut. Dengan demikian, para petani akan berupaya untuk menemukan cara yang terbaik agar hasil panen berikutnya dapat memenangkan Festival dan muncul sebagai juara untuk mengharumkan nama daerahnya.

Tentunya, para pemenang Festival Pertanian akan menerima sertifikat ataupun piagam dan juga piala serta hadiah sejumlah uang (agar daya beli di daerahnya si pemenang meningkat), dengan besaran uangnya disesuaikan dengan tingkatan Festival Pertanian tersebut (tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi atau Nasional). Bisa juga pemenang diberikan pilihan hadiah yang akan diterimakan, dengan cara ditanyakan kepada pemenang, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan untuk pengembangan daerahnya, tentunya dengan nilai materi yang sama kalau hadiah tersebut diberikan berupa uang.

Tidak hanya hasil-hasil pertanian yang dilombakan saja yang ada di arena Festival Pertanian, tetapi juga hasil-hasil kerajinan serta segala macam hasil *home industry* lainnya bisa dijual di sana, sehingga setiap ada Festival Pertanian baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi apalagi Nasional akan muncul temuan-temuan baru yang sangat spektakuler. Keadaan ini mudah-mudahan akan mampu membendung para pemuda yang masih dalam usia produktif untuk tidak melakukan urbanisasi ke kota, bahkan dapat menarik mereka yang telah berada di kota namun masih menganggur atau sudah bekerja namun dengan upah yang pas-pasan, untuk kembali ke desa demi mempertahankan predikat juara yang telah diperoleh desanya dalam Festival Pertanian tersebut.

Provinsi Jawa Timur diharapkan muncul sebagai pelopor dimulainya “Festival Pertanian Kabupaten/Kota dan juga Provinsi”, yang nantinya akan diikuti oleh provinsi-provinsi lain hingga ke Festival Pertanian tingkat Nasional. Dalam jangka panjang, melalui Festival Pertanian ini diharapkan akan muncul hasil-hasil pertanian dengan kualitas yang luar biasa dan akan merupakan bibit unggul di masa datang.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, perlu dibangun kesadaran kritis semua pihak dalam mengawasi dan merespon penyelenggaraan pemerintahan berbasis *good governance*. Bersamaan dengan itu, sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program perlu terus didorong agar program pembangunan berjalan efektif dan efisien. Salah satu instrumen yang diharapkan mampu mendorong terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif adalah melalui forum koordinasi pembangunan partisipatif.

Usaha pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Jawa Timur telah menunjukkan hasilnya. Selain itu juga, usaha para kaum miskin itu sendiri yang ingin mengentas dirinya dari kemiskinan juga menunjukkan hasil yang sangat berarti. Kondisi ini akan menjadi lebih baik, kalau masalah ekonomi di dalam negeri juga menjadi sangat baik.

Saran

Dengan iklim perekonomian yang menjadi semakin kondusif, diharapkan para investor asing melalui PMA (Penanaman Modal Asing) maupun investor dalam negeri melalui PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) akan bersedia untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga pada akhirnya, keadaan tersebut akan mampu mengatasi masalah-masalah pengangguran dan juga kemiskinan di masa datang, terutama melalui peningkatan proyek-proyek yang bersifat *labor intensive*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azhari (1982) dalam Suparlan, P. (1984), The Gelandangan of Jakarta: Politics among the Poorest People in the Capital of Indonesia. *Indonesia*. No. 18 hal. 137-157.
- Badan Pusat Statistik, (2006); *Sensus Ekonomi Indonesia 2006*, Jakarta, Indonesia.
- Breman, J.C. (1985) Sistem Tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik terhadap Konsep-konsep Sektor Informal. Dalam: C. Manning & T. N. Effendi (eds). *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal*. Jakarta: Gramedia.
- Bromley, R., Gerry & Chris (1979) *Casual Work and Poverty in Third World Cities*. Toronto: John Wiley Sons.
- Fitria, B. (2007) *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Jumlah Penduduk dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1999-2003*. Tesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga Surabaya.
- Kuznets, S. (1966), Quantitative Aspect of The Economic Growth of Nations VIII. Distribution of Income by Size: Economic Development and Cultural Change, January, *Journal of Labor Economics* vol 20, No. 3 The University of Chicago, p 79-93.
- Papanek, G & Kuncorojakti, D. (1986), Penduduk Miskin di Jakarta dalam: D. Kuntjorojakti (ed). *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Rosyidi, S. (2001) *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , (2005) *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rebong Jakob; Elena Anthony & Mangiang, M. (1984) Ekonomi Gelandangan Armada Murah untuk Pabrik, dalam: P. Suparlan (ed). *Kemiskinan di Perkotaan Jakarta*.
- Sethuraman, S.V. (1981) *The Urban Informal Sector in Developing Countries*. Geneva: Internasional Labour Office.
- Steele, R. (1986) Mobilitas Pekerjaan dan Penghasilan Migran di Surabaya, dalam: C. Manning & T. N. Effendi (eds). *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Gramedia.
- Suparlan, P. (1984) The Gelandangan of Jakarta: Politics among the poorest people in the capital of Indonesia. *Indonesia*. No. 18 hal. 133-152.
- Tumanggor (1981) dalam Suparlan, P. (1984) The Gelandangan of Jakarta: Politics among the poorest people in the capital of Indonesia. *Indonesia*. No. 18 hal. 130-132.